

Perencanaan Anggaran Upaya Kesehatan Masyarakat Dan Upaya Kesehatan Perorangan Dalam  
Dimensi *District Health Account*  
(Riset Operasional Di Kabupaten Sumba Timur)

Lely Harakai  
Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Timur

Tujuan umum penelitian ini adalah menyusun rekomendasi solusi gap anggaran program UKM dan UKP serta rekomendasi jumlah dan proporsi anggaran program UKM dan UKP yang dibutuhkan Puskesmas di Kabupaten Sumba Timur dalam 8 dimensi DHA. Tujuan khususnya adalah mengidentifikasi kesesuaian jumlah dan proporsi anggaran program UKM dan UKP antara yang direncanakan dengan yang diterima Puskesmas di Kabupaten Sumba Timur. Menganalisis penyebab gap anggaran program UKM dan UKP antara yang direncanakan dengan yang diterima Puskesmas di Kabupaten Sumba Timur. Menganalisis proses perencanaan anggaran program UKM dan UKP di tingkat Puskesmas sampai tingkat kabupaten dalam 8 dimensi DHA. Menghitung jumlah dan proporsi anggaran program UKM dan UKP yang diperlukan Puskesmas di Kabupaten Sumba Timur dalam 8 dimensi DHA.

Penelitian ini merupakan sebuah riset operasional. Dalam penelitian ini, dilakukan perhitungan jumlah dan proporsi anggaran program UKM dan UKP yang dibutuhkan Puskesmas di Kabupaten Sumba Timur tahun 2010. Juga dilakukan telaah dokumen, pengamatan dokumen perencanaan dan *indepth interview* di Puskesmas dan dinas kesehatan Kabupaten Sumba Timur. Puskesmas yang menjadi sumber informasi adalah Puskesmas Waingapu, Puskesmas Kawangu dan Puskesmas Lewa. Petugas kesehatan yang diwawancarai adalah kepala Puskesmas dan pengelola program Puskesmas. Petugas dinas kesehatan yang diwawancarai adalah sekretaris dinas kesehatan, Kabid Yankes dan Kasubag program dan evaluasi. Penelitian dilakukan pada tanggal 20 Mei sampai 20 Juni 2011.

Rekomendasi solusi gap anggaran adalah peningkatan pengetahuan dan ketrampilan petugas kesehatan dalam perencanaan dan penganggaran kesehatan, dilakukannya sosialisasi kekuatan anggaran pemerintah daerah, meningkatkan keterpaduan dalam perencanaan dan penganggaran kesehatan, melakukan proses dan jadwal pelaksanaan kegiatan perencanaan sesuai pedoman P2KT dan peraturan perundang undangan yang ada, serta memanfaatkan data dan informasi DHA untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penganggaran kesehatan. Proporsi anggaran disesuaikan dengan peraturan dalam UU no 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu 2/3 jumlah anggaran dialokasikan untuk kepentingan pelayanan publik.

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah proses perencanaan baik di level Puskesmas maupun kabupaten belum dilakukan dengan baik sehingga menyebabkan timbulnya gap jumlah dan proporsi anggaran program UKM dan UKP antara yang direncanakan dengan yang diterima Puskesmas di Kabupaten Sumba Timur. Saran dalam penelitian ini adalah dilakukannya proses perencanaan sesuai pedoman P2KT.

**Kata kunci:** perencanaan, anggaran, *district health account*